

IAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



LINDA AGUSTINA

01101002083

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

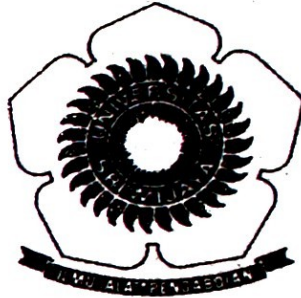
2014

07

S
352.4807
Lih
P
2014

27/4/20 / 28/02

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



LINDA AGUSTINA

01101002083

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelara Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

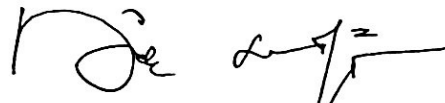
Nama : Linda Agustina
NIM : 01101002083
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 4 September 2014



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP 196007101987031003

Tanggal : 4 September 2014



Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

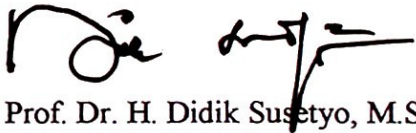
Disusun oleh:

Nama : Linda Agustina
NIM : 01101002083
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 September 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, September 2014

Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP 196007101987031003

Anggota



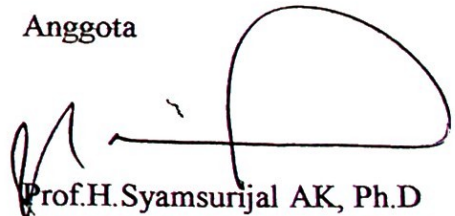
Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP 197007162008012015

Anggota



M. Teguh, S.E, M.Si
NIP. 196108081989031003

Anggota



Prof.H.Syamsurijal AK, Ph.D
NIP.195212121981021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Linda Agustina
NIM : 01101002083
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Propinsi Sumatera Selatan .

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Anggota : Anna Yulianita, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 18 September 2014

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya ilmiah orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, September 2014

Pembuat Pernyataan



Linda Agustina

NIM. 01101002083

RIWAYAT HIDUP

Nama : Linda Agustina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 08 Agustus 1992

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah (Orangtua) : JL. Poltek Rt. 06 Rw. 02 No. 420 Bukit Lama Kec.
Ilir Barat 1 Palembang

Alamat Email : Agustina_128@yahoo.com

Pendidikan Formal :

SD : SD Negeri 9 Palembang

SMP : SMP Negeri 18 Palembang

SMA : SMK Negeri 3 Palembang

Pendidikan Non Formal : -



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Propinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal tahun 2008 sampai 2012. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, September 2014

Linda Agustina

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :

Linda Agustina

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Propinsi Sumatera Selatan.

Data yang digunakan adalah data panel, yaitu periode 2008-2012 dari lima belas kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Untuk menganalisis penulis menggunakan metode regresi data panel, yaitu Model *Random Effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum. Pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, artinya jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Modal juga meningkat. Terdapat hubungan positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, artinya jika Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Modal juga meningkat..

Kata Kunci: *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum*

ABSTRACT

The Influence Of Local Government Revenues And Unconditional Transfer On The Capital Expenditure In South Sumatera Province

By:

Linda Agustina; Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si; Anna Yulianita, S.E., M.Si

This study was aimed at finding out the influence of the local government revenues and unconditional transfer on the capital expenditure in South Sumatera Province. The data were secondary panel data taken from fifteen districts/cities in South Sumatera Province in 2008 – 2012. The Random Effect Model of panel data regressions were used to analyze data. This study showed that there was a positive influence of the local government revenues and unconditional transfer on the capital expenditure implying that an increase in the local government revenues would cause an increase in the capital expenditure. There was a positive relationship between the unconditional transfer and the capital expenditure in South Sumatera Province. An increase in unconditional transfer would cause an increase in the capital expenditure.

Keywords: *Local Government Revenues, Unconditional Transfer, Capital Expenditure*

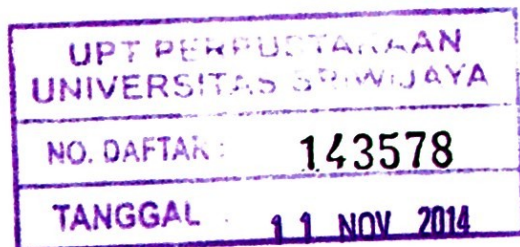
Acknowledged by,



Hariswan P.J., M.Pd.

Email: hariswan@yahoo.com

Language Laboratory, Graduated School of Sriwijaya Iniversity



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	11
2.1.2 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	14
2.1.3 Teori Defisit Spending dan Surplus Spending	15
2.1.4 Teori Penerimaan.....	18
2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah	18
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	24

2.1.7 Dana Alokasi Umum	25
2.1.8 Belanja Modal	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
2.4 Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
3.4 Teknik Analisis	40
3.4.1 Pemodelan Data Panel	41
3.4.2 Estimasi Data Panel	42
3.4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	42
3.4.4 Uji Statistik.....	44
3.4.4.1 Uji F Statistik	44
3.4.4.2 Uji t Statistik	45
3.4.4.3 Uji R ²	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum.....	46
4.1.1 Geografis dan Wilayah	46
4.1.2 Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan	47
4.1.3 Perkembangan Belanja Modal Kab/Kota di Prop Sumsel	48

4.1.4 Perkembangan PAD Kab/Kota di Propinsi Sumsel.....	49
4.1.5 Perkembangan DAU Kab/Kota di Propinsi Sumsel	51
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Estimasi Model Regresi PAD terhadap DAU	52
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel <i>Random Effect</i>	53
4.2.3 Uji Statistik.....	56
4.2.4 Estimasi Model Regresi PAD & DAU terhadap BM	59
4.2.5 Hasil Estimasi Regresi Data Panel <i>Random Effect</i>	60
4.2.6 Uji Statistik.....	63
4.3 Pembahasan	59
4.3.1 Pengaruh PAD Terhadap DAU	66
4.3.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal.....	66
4.3.3 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	67
4.3.4 Analisis Intersep Belanja Modal	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi PAD dan DAU di Propinsi Sumsel	7
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Adm di Propinsi Sumsel...	47
Tabel 4.2 Hasil Uji menggunakan <i>Chow Test</i> PAD terhadap DAU.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji menggunakan <i>Hausman Test</i> PAD terhadap DAU.....	53
Tabel 4.4 Hasil Regresi Model DAU dengan <i>Random Effect</i>	54
Tabel 4.5 Koefisien Determinasi	56
Tabel 4.6 Hasil Uji menggunakan <i>Chow Test</i> PAD & DAU terhadap BM.	59
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman Test</i> PAD & DAU terhadap Belanja Modal.	60
Tabel 4.8 Hasil Regresi Model Belanja Modal dengan <i>Random Effect</i>	61
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	21
Gambar 2.2 Teori Peacock dan Wiseman.....	22
Gambar 2.3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	23
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Perkembangan Belanja Modal di Propinsi Sumatera Selatan..	49
Gambar 4.2 Perkembangan PAD di Propinsi Sumatera Selatan.....	50
Gambar 4.3 Perkembangan DAU di Propinsi Sumatera Selatan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Propinsi Sumatera Selatan	79
Lampiran 2 Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Propinsi Sumatera Selatan	80
Lampiran 3 Belanja Modal Kab/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.....	81
Lampiran 4 Hasil Regresi Model DAU dengan <i>Random Effect</i>	82
Lampiran 5 Hasil Regresi Model Belanja Modal dengan <i>Fixed Effect</i>	83
Lampiran 6 Hasil Regresi Model Belanja Modal dengan <i>Random Effect</i>	84
Lampiran 7 Hasil Regresi dengan <i>Chow Test</i>	85
Lampiran 8 Hasil Regresi dengan <i>Hausman Test</i>	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergantian pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat (Halim, 2012: 1).

Di era reformasi, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dalam UU No. 22/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32/2004. UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif. Pengertian pemerintah daerah berubah, yaitu mencakup kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Definisi tersebut memberikan deskripsi yang jelas mengenai pemisahan antara legislatif dan eksekutif. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan

lagi kepada presiden. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemerintah dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi : (1) pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, (2) penyelenggaraan, pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah dan (3) penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Halim, 2012: 1-2).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Yuwono, 2005: 50).

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional (Yuwono, 2005: 50).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2008: 328).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya tergantung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002: 59).

Menurut Halim (Rahmawati, 2010: 2) adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan

pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah; hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan (Yuwono, 2005: 53).

UU No. 32 Tahun 2004 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Proses pelayanan publik merupakan tujuan utama dari organisasi pemerintah. Hal inilah yang membedakan dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, laba bukan merupakan tujuan utama pemerintah, melainkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses pencapaian laba yang tinggi pada organisasi bisnis dengan meningkatkan pendapatan dan menekan belanja atau biaya tidak serta merta bisa diadopsi di pemerintahan terutama pemerintah daerah (Halim, 2012: 28).

Salah satu dari belanja langsung adalah belanja modal, menurut Abdul Halim (2002: 72) “belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan”.

Menurut Direktorat Jenderal Anggaran (2014) dalam PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Paujiah, 2012: 3).

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu, juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Sumarmi, 2008: 2).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat

kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Sumarmi, 2008: 2).

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Sumarmi, 2008: 3).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Putro, 2010: 3).

Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara garis besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus

disediakan pemerintah. Sedangkan kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan suatu daerah untuk melaksanakan aktivitas di daerahnya (Halim, 2012: 190).

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Dana Alokasi Umum (Rupiah)
2001	190.521.658.000	168.765.822.000
2002	289.634.625.000	211.530.000.000
2003	428.080.427.000	231.930.000.000
2004	493.132.547.170	224.874.000.000
2005	594.754.228.650	242.707.000.000
2006	743.056.584.741	421.381.000.000
2007	847.970.651.231	510.197.000.000
2008	1.139.854.762.705	545.776.113.000
2009	1.171.643.000.000	507.355.830.000
2010	1.496.643.283.800	512.083.580.000
2011	1.849.119.912.016	646.813.301.000
2012	1.899.649.695.000	716.153.261.000

Sumber: *BPS Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Dalam Angka, 2014*

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai tahun 2012. Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai tahun 2008. Pada tahun 2009 Dana Alokasi Umum mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2012.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya (Putro, 2010: 4).

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin mengetahui apakah aset tetap pemerintah daerah selama ini telah dibelanjakan dengan pendapatan asli

daerah atau di danai oleh bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, judul penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Di Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian adalah

- a. Bagi akademisi, dapat menambah ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah dan dapat menambah kelengkapan kepustakaan.
- b. Bagi praktisi, dapat memberikan masukan sebagai tujuan pengambilan kebijakan publik kepada pemerintah daerah di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang diuraikan secara garis besar dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil analisis data penelitian sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan pembahasan yang berasal dari hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian serta temuan-temuan penelitian terdahulu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diajukan peneliti berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. "Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 2:17-32.
- Ajija, Shochrul R. 2012. *Cara Cerdas Menguasai E-views*. Penerbit: Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2008. *Buku Statistik Indonesia, 2008*. Palembang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2014. Palembang: BPS.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas, Makasar.
- Direktorat Jenderal Anggaran , 2014. Dalam PMK Nomor 91/PMK 06/2007 Tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diambil pada tanggal 19 November 2013 dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Ginting, Ripka Serildahnaita. 2010. "Analisis Kausalitas Antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Mepa Ekonomi Usudi*.
- Gujarati, Damodar N. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Harianto, David & Adi, Priyo Hari. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan

- Pendapatan Per Kapita”. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas, Makasar.
- Indarti, Iin & Sugiartiana. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009”. *Fokus Ekonomi*, Vol. 7 No. 2: 1-15.
- Khairil. 2009. “Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Di Propinsi Sumatera Selatan”. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Kusnandar, & Siswantoro, Dodik. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. Universitas Indonesia. Diambil pada tanggal 17 Februari 2013 dari <http://ml.scribd.com>
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*. Edisi Keenam. Penerbit: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mawarni, Darwanis & Abdullah, Syukriy. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (study pada kabupaten dan kota di Aceh)”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No. 2. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Mentayani, Ida, Hayati, Nurul & Rusmanto. 2012. “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan”. *Jurnal Spread*, Vol. 2 No. 1.
- Oktora, Fahri Eka & Pontoh, Winston. 2013. “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”. *Jurnal Accountability*, Vol. 2 No. 1.

- Paujiah, Sri Puji. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Study Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)". Universitas Siliwangi.
- Pasaribu. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Struktur APBD.
- Permana, Deva Yoga. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI*, Vol. 8 No. 2.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Struktur APBD.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Septiani, Renny. 2007. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang". *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasi).

- Setyowati, Lilis & Suparwati, Yohana Kus. 2012. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)". *Prestasi*, Vol. 9 No. 1.
- Situngkir, Anggiat & Manurung, John Sihar. 2009. "Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara". *Kajian Akuntansi*, Vol. 4 No. 2: 93-103.
- Sularno, Fitria Megawati. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)". *Skripsi*, Universitas Widyatama, Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit : Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sumarmi, Septaningsih. 2008. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Propinsi D.I. Yogyakarta". Diambil pada tanggal 21 Januari 2014 dari <http://upy.ac.id>
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Syaiful. 2007. "Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah".
- Tuasikal, Askam. 2008. "Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 2 : 142-155.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Yovita, Farah Marta & Utomo, Dwi Cahyo. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yuwono, *et,ai*. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Jawa Timur: Penerbit Bayumedia Publishing.